

## Bahas Empat Raperda Hingga LKPj Wali Kota



Sumber gambar :TribunKaltim.co Kamis,25/04/2024

- **DPRD Kota Balikpapan Gelar Rapat Paripurna**

**BALIKPAPAN, TRIBUN** – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menggelar Rapat Paripurna. Rapat tersebut membahas tiga agenda penting, mencakup jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR), Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA), penyelenggaraan bantuan hukum, pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi.

Adapun Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Balikpapan, Budiono; di dampingi Wakil Ketua III, Laisa Hamisah; dan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan, Muhaimin, di Ruang Rapat Paripurna, Balikpapan, Kalimantan Timur. Rabu (24/4).

Selanjutnya, agenda Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan Terkait Pembentukan Struktur Perangkat Daerah. Pembahasan ketiga adalah Rekomendasi Fraksi-fraksi DPRD Balikpapan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Budiono mengatakan pembahasan atas keempat Raperda tersebut telah selesai dan akan disampaikan ke Pj Gubernur Kaltim untuk dievaluasi. Sehingga nantinya menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ia menambahkan, untuk Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pendapat Wali Kota yaitu Pembentukan Struktur Perangkat Daerah. Untuk catatan sendiri, lebih menekankan kepada kebutuhan profesionalisme dan bukan suka atau tidak suka dan berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). “Karena ke depan tantangannya lebih berat lagi,” tandas Budiono.

Adapun untuk penyampaian Rekomendasi DPRD melalui fraksi-fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2024. Ia

menuturkan, terdapat catatan beberapa fraksi salah satunya menanyakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atas LKPj.

Bidang-bidang lain yang juga menjadi sorotan fraksi, ialah berbagai proyek di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). “Seyogianya<sup>i</sup> melampirkan dengan dokumen LKPj, apa capaian targetnya yang digunakan oleh APBD selama satu tahun itu, bebarnya. Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, Budiono mengaku, dengan tiga agenda ini merupakan rapat terpanjang sepanjang sejarahnya menjadi wakil rakyat dari parlementaria. “Ini Rapat Paripurna yang paling lama saya nilai, karena dimulai 08.00-12.00 Wita lewat,” pungkasnya. (adv/ars)

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Bahas Empat Raperda hingga LKPj Wali Kota, 25/04/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan sebagai berikut:
  - (1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

---

<sup>i</sup> Seyogianya adalah sepatutnya; selayaknya; semestinya, diakses pada 19/11/2024 <https://id.wiktionary.org/wiki/seyogianya>.